

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan basis sosial ekonomi masyarakat. Diakui peranannya yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional, berbagai langkah telah dilakukan untuk mengembangkan sektor UMKM, namun sektor tersebut belum berkembang seperti yang diharapkan. Berbagai persoalan klasik seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran dan teknologi masih menjadi persoalan klasik bagi sektor UMKM. Selain persoalan klasik tersebut, berbagai langkah struktural yang ada, seperti langkah menaikkan pajak properti UMKM, tarif listrik, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain, juga tidak menguntungkan sektor UMKM. Kebijakan yang tidak menguntungkan sektor UMKM membuat sektor UMKM kurang berdaya saing (Budiarto *et al.*, 2015). Akibatnya, produk UMKM kurang berdaya saing dan kalah bersaing dengan produk luar negeri yang lebih inovatif. Tentu saja, kelangsungan hidup sektor UMKM di era global menjadi tantangan tersendiri.

Menghadapi kenyataan ini, berbagai aktor memiliki peran untuk mengembangkan sektor UMKM agar lebih mandiri dan berdaya. Untuk memfasilitasi pemberdayaan sektor UMKM diperlukan peran berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, perbankan, perguruan

tinggi dan berbagai organisasi bisnis. Perguruan tinggi dan perbankan berperan sebagai inkubator yang dapat mempromosikan dan menyediakan produk inovasi dan dukungan bagi pelaku UMKM (Budiarto et al., 2015).

Kebijakan pemerintah terkait pendanaan UMKM untuk memenuhi permodalan yang dibutuhkan merupakan hal yang lumrah, dimana pemerintah bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memberikan pinjaman lunak, termasuk menawarkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Bank Indonesia (BI) memiliki program yang mewajibkan bank untuk mengkonversi pinjaman modal kerja untuk UKM menjadi setidaknya 20% dari total pinjaman bank (Nuraini, 2022).

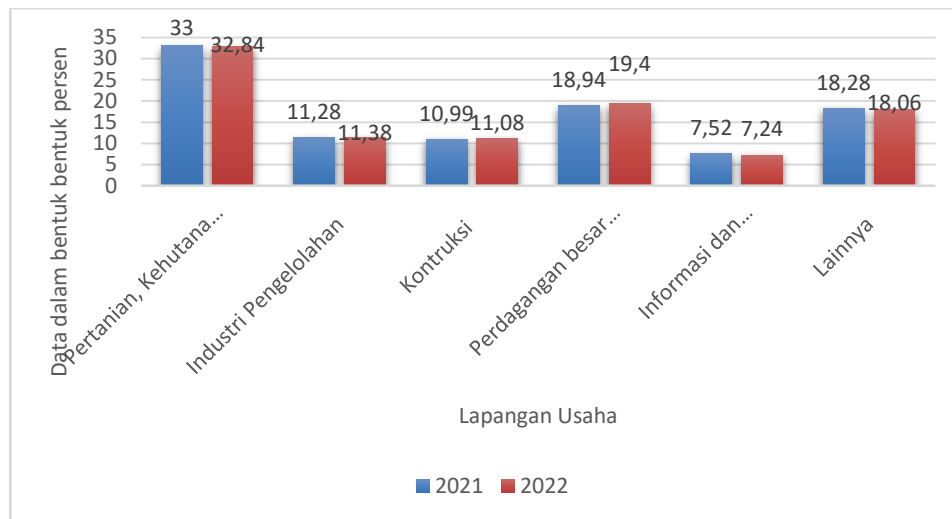
Keberhasilan UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong pembiayaan bagi UMKM. Terkait dengan misi dan program pembangunan ekonomi di sektor ekonomi tertentu seperti ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan, pemerintah telah menginisiasi berbagai skema pembiayaan atau pembiayaan UMKM. Peran pemerintah dalam program pinjaman UMKM ini adalah menyediakan dana APBN untuk subsidi suku bunga kepada sistem perkreditan, namun 100% dana pinjaman atau dana tersebut berasal dari bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu, pemerintah harus siap untuk menyediakan dana bagi UMKM di bawah program yang dimaksudkan, menetapkan kebijakan dan prioritas bisnis untuk memperoleh pinjaman, memberikan bimbingan dan dukungan sepanjang siklus hidup pinjaman, dan melayani untuk memfasilitasi hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya (Mulyati, 2016).

Tabel 1.1
UMKM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Sektor

No	Sektor/Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	181.870
2.	Pertambangan dan penggalian	188
3.	Industri pengolahan	26.669
4.	Pengadaan listrik dan gas	148
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah	366
6.	Konstruksi	689
7.	Perdagangan besar dan eceran	56.062
8.	Transportasi dan pergudangan	3.614
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	25.934
10.	Informasi dan komunikasi	2.472
11.	Jasa keuangan dan asuransi	743
12.	Real estate	273
13.	Jasa perusahaan	1.962
14.	Jasa pendidikan	4.522
15.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.159
16.	Jasa lainnya	5705
Total		312.376

Sumber : Diskop UMKM Jatim, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 Kabupaten Lamongan terdapat 312.376 UMKM yang telah menyerap ribuan tenaga kerja. Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan jika nilai UMKM di Lamongan cukup besar dan berpotensi untuk meningkatkan taraf perekonomian serta kesejahteraan bagi masyarakat Lamongan. Pada sektor perdagangan, pertanian, peternakan, kerajinan dan sebagainya Lamongan banyak memiliki UMKM yang tersebar hampir pada setiap kecamatan maupun desa hal tersebut merupakan bentuk kemandirian masyarakat. Dengan adanya UMKM rumahan (*home made*) dirasa cukup membantu perekonomian daerah serta mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Lamongan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan juga turut berperan dalam mengembangkan serta memberi arahan terhadap UMKM yang masih minim akan pengetahuan dengan cara memberikan pelatihan, pemberdayaan serta fasilitas berupa peningkatan jaringan kerjasama dalam hal pemasaran. Letak gedung yang strategis diharapkan diharapkan dapat menarik perhatian orang-orang dari berbagai daerah untuk berkunjung dan berbelanja.



Sumber : BPS Kab. Lamongan, 2023

Gambar 1.1
Persentase PDRB Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha

UMKM telah berperan sangat penting dalam kemajuan ekonomi Kabupaten Lamongan dalam artian memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dan PDRB (Produk Domesti Regional Bruto). Geliat UMKM Lamongan telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Lamongan, dapat dilihat dari indeks perekonomian di Lamongan dari -2,43% hingga menjadi 5,56%. Saat ini jumlah pelaku UMKM di Lamongan telah tercatat sebanyak 7.635 UMKM, diantaranya mampu melakukan ekspor di berbagai negara. Selanjutnya, lapangan usaha yang memiliki peran dominan diantaranya perdagangan besar dan eceran ; Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,40% industry pengolahan sebesar 11,38% kontruksi sebesar 11,08% serta informasi dan komunikasi sebesar 7,24. Kontribusi manufaktur dan industry grosir atau eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terus berkembang selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu bidang usaha industry kontruksi dan industry informasi dan informasi cenderung konstan (BPS Lamongan. 2023).

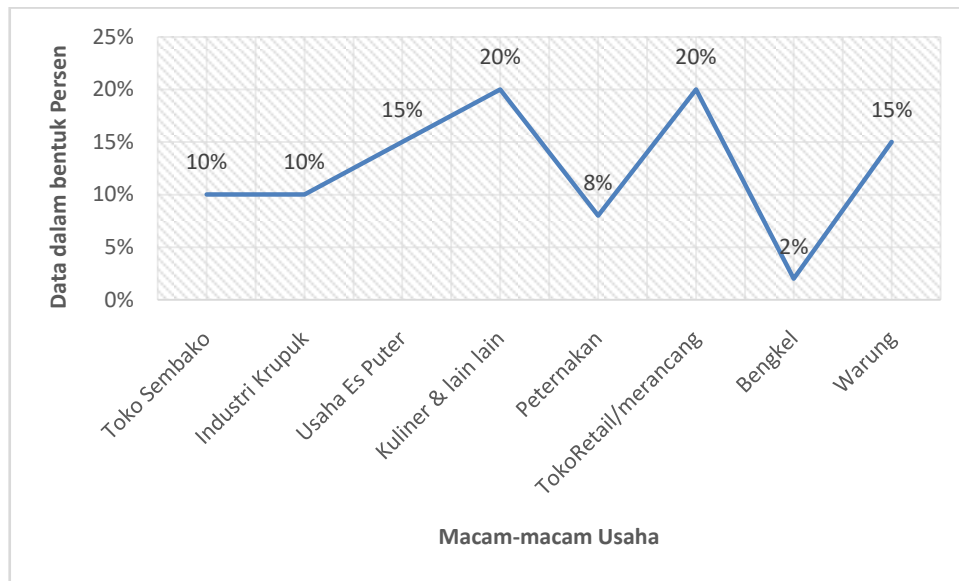
Salah satu sistem kredit yang terkenal di masyarakat adalah KUR, dirancang khusus untuk UMKM yang memiliki kategori bisnis yang menguntungkan tetapi tidak memiliki agunan permodalan yang cukup sesuai dengan persyaratan bank. KUR adalah kredit atau pinjaman untuk UMKM yang saat ini tidak memiliki kredit atau pinjaman pada bank atau tidak memiliki kredit program dari pemerintah pada saat pengajuan pinjaman. Tujuan akhir dimulainya program KUR adalah untuk meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja (Apriliani, 2021).

Krisis keuangan yang dimulai pada tahun 1998 membuat bank-bank konvensional kewalahan dan banyak yang harus dilikuidasi karena kegagalan sistem bunga. Sedangkan bank syariah dapat tetap eksis dan bertahan. Namun, kelalaian bank untuk mengarahkan uang pihak ketiga dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian moral. Moral hazard secara harfiah berarti “jebakan moral” dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan sebagai suatu kondisi yang timbul dari seseorang yang terikat pada sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat meningkatkan terjadinya peristiwa bahaya yang merugikan. Moral hazard perbankan Indonesia membuat fundamental sektor perbankan rapuh. Adanya sistem penjaminan tidak menjamin keamanan keuangan klien. Berdasarkan pengalaman beberapa negara, adanya program penjaminan nasional dan perlindungan simpanan meningkatkan moral hazard perbankan. Pertama moralitas pada level bank dan kedua moralitas pada level nasabah (Suciningtias, 2017).

Skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan untuk pinjaman modal kerja dan investasi khusus untuk UMKM dan koperasi yang layak dalam bisnis tetapi tidak memiliki agunan yang

memadai sesuai persyaratan perbankan. Tujuan akhir dimulainya program KUR adalah untuk meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja. Pengenalan KUR diawali dengan keputusan rapat terbatas tingkat menteri yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Agenda keputusan tersebut antara lain terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi, untuk menjamin akses yang lebih baik bagi UMKM dan koperasi terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan oleh pemerintah meningkatkan kapasitas perusahaan penjaminan untuk berpromosi. Dengan cara ini, UMKM dan koperasi yang kesulitan mengakses kredit/pinjaman dari bank karena kurangnya agunan dapat diatasi. KUR didirikan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Republik Indonesia (Mulyati, 2016).

Pemberian pinjaman sebagai tambahan modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan efek positif bagi perkembangan UMKM (Sudiyarti et al., 2019). Pada akhirnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Geger, secara tidak langsung mereka terdorong untuk berusaha memulai dan mengembangkan usahanya. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Lamongan semakin meningkat dan lapangan kerja semakin banyak, yang akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan investasi yang lebih tinggi.



Sumber : Data UMKM Desa Geger 2022

Gambar 1.2
Persentase Macam Usaha di Desa Geger

Berdasarkan presentase grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari UMKM yang ada di Desa geger merupakan usaha kuliner dan lain-lain dengan presentase sebesar 20%. Dan untuk UMKM yang paling rendah dengan presentase hanya sebesar 2% di duduki oleh usaha bengkel. Desa Geger sendiri terkenal dengan beberapa macam kulinernya yang enak dan lezat salah satunya yaitu lumpia dan juga roti goreng. Keunikan yang dimiliki UMKM khususnya di Desa Geger untuk mempertahankan usahanya agar dapat bersaing dengan makanan kuliner modern lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu telah mengidentifikasi adanya research gap.

Menurut Parwanti (2019) bahwa responden penerima KUR BRI Syariah mengalami peningkatan kinerja UMKM setelah mendapat bantuan dana KUR, dilihat dari modal, omzet penjualan, keuntungan, jumlah jam kerja dan kesejahteraan. Dari hasil yang diperoleh, diharapkan adanya peran dari lembaga keuangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Menurut Apriliani (2021) pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Syariah Unit Kepahiang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Hal ini terlihat dari perkembangan permodalan sebelum dan sesudah KUR Bank Bri Syariah juga mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat kuat. Sebagai keuntungan yang menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini akan menyajikan plafond yang diperoleh hingga pendapatan dari pelaku UMKM di Desa Geger sebelum dan setelah menerima modal KUR serta memberikan solusi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan dan perbankan atas kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Peneliti juga akan menjelaskan secara detail bagaimana KUR dapat memberikan peranan yang baik bagi UMKM milik para nasabah dengan menginterview secara langsung masing-masing nasabah.

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat beberapa permasalahan yang ada di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut : 1. Keterampilan (*Knowledge skill*) rata-rata pemilik usaha mikro, kecil, menengah dan karyawan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan berdasarkan data yang dikumpulkan, tingkat pendidikan dari total 15 UMKM bervariasi antara SD-SMP-SMA. Pemilik UMKM penerima dana KUR masih minim akan pengetahuan dan pemahaman cara untuk mengelola dan mendapatkan dana KUR. 2. Faktor penyalahgunaan dana KUR, berdasarkan hasil interview oleh beberapa pelaku UMKM yang memiliki KUR. Sebagian pelaku UMKM juga menggunakan dana KUR tidak hanya untuk usaha saja akan tetapi juga digunakan untuk hal lain, seperti membeli mobil atau membeli tanah. 3. Kesulitan pemasaran berdasarkan survey yang telah dilakukan bahwa di Desa

tersebut masih minim akan pengetahuan mengenai digital elektronik mengingat rata-rata pemilik UMKM berumur sekitar 35 keatas. Para pelaku UMKM tidak tahu bahwa media online juga bisa untuk memasarkan produk mereka dan bisa dikenal diluar desa hingga provinsi yang nantinya akan menambah pendapatan serta mengembangkan usahanya dan membuat desa asal UMKM tersebut dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peranan kredit usaha rakyat (KUR), terhadap pendapatan, perkembangan, dan kendalanya yaitu keterampilan, konsumsi serta pemasaran UMKM khususnya yang berada di Desa Geger Kabupaten Lamongan. Yang akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pengembangan UMKM di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana peran Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan, perkembangan usaha dan kendala usaha yaitu keterampilan, konsumsi serta pemasaran UMKM di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menganalisis peran Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan, perkembangan usaha dan kendala usaha yaitu keterampilan, konsumsi serta pemasaran UMKM di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis : Manfaat praktis yang diharapkan bagi penulis adalah hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh informasi empiris, terkait peranan kredit usaha rakyat dalam pengembangan UMKM.
2. Manfaat teoritis : Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pendapatan, perkembangan dan kendala UMKM yaitu keterampilan, konsumsi, serta pemasaran UMKM khususnya yang menyangkut tentang para pelaku UMKM dan sebagai upaya untuk melatih berfikir secara ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada.